

Judul : Fahri Hamzah Kembali Dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan
Tanggal : Selasa, 31 Januari 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 8

Fahri Hamzah Kembali Dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan

JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah kembali dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akibat pernyataannya di Twitter yang dinilai merendahkan tenaga kerja Indonesia (TKI). Setelah pekan lalu pengaduan dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Buruh Migran, kemarin laporan baru diserahkan Lingkaranku Aku Cinta Indonesia (LACI) kepada Mahkamah Kehormatan.

Ketua LACI Nur Halimah meminta MKD memeriksa Fahri. "Tidak selayaknya FH (Fahri Hamzah) yang pejabat, apalagi Wakil Ketua DPR, mengatakan seperti itu," kata Nur Halimah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

LACI merupakan gabungan dari 55 organisasi buruh migran di Hong Kong. Mereka melaporkan kicauan Fahri di akun Twitter-nya pada Selasa pekan lalu, yang mengatakan, "Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela."

Fahri telah menghapus cuitannya itu setelah menerima banyak kritik. Dia mengatakan tidak bermaksud menyinggung perasaan. Dia berdalih kicauan itu sebagai kritik terhadap pemerintah soal banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke

Indonesia.

Menurut Nur Halimah, para TKI bekerja di luar negeri karena ada permintaan tenaga kerja dari negara lain. "Jadi, kami bukan pengemis. Kami bukan babu," ujarnya. LACI menilai Fahri diduga melanggar Pasal 9 ayat 2 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan. Dalam pasal itu disebutkan bahwa anggota Dewan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya tidak diperkenankan berprilaku buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan yang tidak relevan, baik dengan perkataan maupun tindakan. LACI juga menginginkan agar Fahri diperiksa dalam dugaan pelanggaran Pasal 81 huruf (g) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan kewajiban anggota menaati tata tertib dan kode etik.

Laporan LACI ini diterima oleh staf MKD. Namun, kata Nur Halimah, masih ada kekurangan, terutama pada berkas legalitas. "Hari ini akan kami selesaikan," ujarnya.

Wakil Ketua MKD Adies Kadir berujar bahwa setiap laporan yang masuk akan diverifikasi terlebih dulu. "Kasusnya tetap satu, tapi tetap kami tunggu verifikasi dulu," tuturnya.

● AHMAD FAIZ